



**BERHENTI
MENGAYOMI
KORUPSI**

Perempuan dan Kebijakan Bansos Covid-19

Almas Sjafrina | almas@antikorupsi.org

www.antikorupsi.org



Background

- ICW bersama dengan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Jawa Timur dan Bengkel Appek NTT sedang mengkaji kebijakan dan implementasi bansos, khususnya mengenai keterjangkauan program tersebut pada perempuan rentan dan peran perempuan dalam mengawasi bansos.
- Pandemi memperparah kerentanan ekonomi perempuan dan ketidaksetaraan gender di Indonesia sehingga mengancam kemajuan pencapaian Sustainable Development Goals (UN Women, 2020).
- 623.407 pekerja perempuan dirumahkan dan terkena PHK (Kemenaker, 2021) dan ketimpangan gender yang melebar selama pandemi mempersempit peluang serta kesempatan perempuan untuk mendapatkan/ melakukan pekerjaan alternatif.
- Dari pemantauan ICW terhadap program bansos pada Juni-Agustus 2021 terlihat bahwa kecurangan bansos banyak menempatkan perempuan sebagai korban. Di DKI Jakarta, 65% pelapor kecurangan bansos adalah perempuan.



- Apakah program bansos dan perlindungan sosial lainnya yang dirumuskan oleh pemerintah telah mempertimbangkan dampak serta kebutuhan perempuan rentan?
- Bagaimana keterjangkauan perempuan rentan terhadap program bansos pemerintah?
- Adakah program khusus untuk penanggulangan dampak pandemi Covid-19 yang spesifik menjawab kebutuhan perempuan dan menempatkan perempuan sebagai penerima manfaat?

Disertai pemantauan mengenai kecurangan bansos



- Kementerian PPPA: bantuan-bantuan selama ini bersifat umum sehingga perlu ada bantuan spesifik
- Kemenkeu: sebagian besar bansos Covid-19 diberikan kepada perempuan dikarenakan dampak Covid-19 lebih berat dirasakan perempuan.
- Catatan sementara, bansos yang diberikan pemerintah belum kuat memperhatikan pengarusutamaan gender.
 - Bantuan berisi kebutuhan spesifik perempuan masih sangat terbatas/ minim. Apakah dinilai perlu?
 - Bansos sembako yang diberikan oleh pemerintah (kota) kurang memperhatikan pemenuhan gizi keluarga.
 - Penerima bansos yang diwawancarai banyak mengaku bahwa pihaknya tidak didata mengenai apa dampak Covid-19 dan kebutuhan pokok mereka di tengah Covid-19.
 - Ada cerita baik di Kota Surabaya, di mana bantuan sembako yang disalurkan ke warga disertai dengan pemberian bantuan spesifik dan memberdayakan UMKM.



- Masih banyak perempuan rentan yang belum tersentuh bansos dan belum mengetahui bagaimana cara mendapatkan bansos.
 - Masalah keterbatasan akses informasi
 - Masalah administrasi
 - Keterbatasan program bansos
- Ditemukan dugaan adanya pemotongan bansos dan pengurangan sembako yang tidak semuanya disadari oleh warga penerima.



- Perlu ada pelibatan warga yang lebih besar dalam perumusan program bansos agar bantuan lebih tepat menjawab kebutuhan target sasaran.
- Perlu ada kebijakan afirmatif agar perempuan rentan dan terdampak Covid-19 lebih terbantu dan terjangkau program perlindungan sosial pemerintah.
- Perlu ada sosialisasi yang lebih masif dan aksesibel perihal informasi rinci mengenai bansos, tata cara pendaftaran, platform dan tata cara pengaduan, dll. Terlebih lagi kelompok perempuan sangat potensial menjad agen untuk mengawasi program bansos.
 - Tidak semua warga telah akrab mengakses informasi kebijakan melalui internet.



Pengetahuan Adanya Kanal Pengaduan terkait Bansos Pemerintah Selama Pandemi Covid 19

*56,7% responden adalah perempuan

JENIS KANAL PENGADUAN	YA		TIDAK		Total
	Frek.	%	Frek.	%	
<input type="checkbox"/> Pengaduan Bansos Yang Dikelola Pemkot	9	7,5	111	92,5	120
<input type="checkbox"/> Call Center Bansos oleh Kemensos	5	4,2	115	95,8	120
<input type="checkbox"/> Aplikasi JAGA Bansos oleh KPK	0	0	120	100	120
<input type="checkbox"/> Aplikasi LAPOR	0	0	120	100	120



Semoga "PAPA"
Cepet S... uh
hanSN

JANGAN
H KENDORP
ahanSN

SEKIAN



Foto: ANTARA
FOTO/Wahyu Putro